



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 27 Januari 2020

Halaman: 2

SELARASKAN INVESTASI DENGAN PUSAT

Pemkot Didorong Segera Koordinasi ke BKPM

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya mendorong Pemkot untuk segera melakukan koordinasi dengan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) RI. Hal ini untuk menyelaraskan program investasi antara daerah dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, mengungkapkan pihaknya sempat melakukan konsultasi ke BKPM terkait program investasi. "Dalam konsultasi itu kami memperoleh penjelasan jika Peraturan Presiden (Perpres) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan segera diterbitkan. Ini peluang bagi Pemkot untuk segera berkoordinasi dengan BKPM," tandasnya.

Minggu (26/1).

Menurutnya, pihak BKPM sangat terbuka bagi ruang koordinasi dengan daerah. Dengan catatan, daerah harus menyampaikan surat secara resmi terlebih dahulu. Setelah itu walikota bisa berdialog dengan jajaran BKPM di Jakarta. Apalagi, salah satu titik tekan pembangunan nasional ialah pengembangan investasi pariwisata nasional di Borobudur-Yogyakarta.

Melalui koordinasi antara daerah de-

ngan pusat tersebut maka program yang dijalankan Pemkot dapat diselaraskan secara nasional. Terutama menyangkut enam hal pokok yakni kemudahan berusaha, eksekusi realisasi investasi besar, mendorong investasi yang melibatkan UMKM, penyebaran investasi berkualitas, promosi investasi terfokus, dan peningkatan investasi dalam negeri.

"Harapan yang muncul adalah jika semua program sampai tahun 2024 bisa diuraikan maka diharapkan terdapat keterkaitan terhadap seluruh program pengembangan investasi di Kota Yogya dapat diselaraskan dengan indikator BKPM 2020-2024," urainya.

Selain itu, dengan pertemuan antara

walikota dengan BKPM harapannya program yang akan diselaraskan dapat diuraikan lebih detail sehingga dapat diterjemahkan lebih implementatif oleh pemerintah pusat. Dalam konteks lokal pengembangan Stasiun Tugu, Stasiun Lempuyangan dan pusat bisnis Lempuyangan yang akan terintegrasi dengan keberadaan Bandara NYIA di Kulonprogo, juga diharapkan bisa dikoordinasikan dengan BKPM. Sehingga semua rangkaian proses pembangunan bisa menuju kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan sosial.

"Apalagi saat ini sedang dibahas rancangan perda terkait rencana tata ruang wilayah. Ini peluang agar pengaturan zona investasi bisa tepat dan terukur,"

tandas Fokki.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Nurwidi Hartana, mengaku turut serta dalam konsultasi dengan BKPM di Jakarta. Pada kesempatan itu dirinya fokus menanyakan tentang kewenangan daerah dalam proses perizinan One Single Submission (OSS). Melalui OSS, semua proses perizinan yang berkaitan dengan investasi apapun dilakukan melalui aplikasi dan diambil alih kewenangan oleh pemerintah pusat. Dalam dialog tersebut ditegaskan jika kewenangan daerah adalah mengklarifikasi kebenaran dokumen yang telah disampaikan oleh investor juga melalui aplikasi. (Dhi-m)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005